



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALWIS**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **163839**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.248.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/62 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 448.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 318 m2/150 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 363 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 182.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 304.000.000****D. SURAT BERTAHAP** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. ----****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 1.734.500.000****III. HUTANG** **Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 1.734.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.